

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Solopos

Wilayah Berita: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 2

Capaian Tinggi, Komisi C Apresiasi UPPD Sukoharjo

PENDAPATAN asli daerah (PAD) menjadi faktor penting pertumbuhan pembangunan daerah. Untuk itu, Komisi C DPRD Jawa Tengah terus memantau dan meningkatkan capaian pendapatan yang dilakukan unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) di sejumlah daerah dan salah satunya di Sukoharjo.

Hingga catur wulan pertama 2018, UPPD Sukoharjo mampu mencapai 36,86 persen atau sekitar Rp 74,72 miliar dari target yang telah ditetapkan Rp 202,70 miliar. Capaian yang dinilai cukup tinggi ini memperoleh apresiasi dari Komisi C.

"Kinerjanya bagus dan capaian cukup tinggi," kata Sekretaris Komisi C DPRD Jateng Tety Indarti saat memimpin kunjungan kerja Komisi ke UPPD Sukoharjo, beberapa waktu lalu.

Meski capaian sudah tinggi, namun UPPD Sukoharjo diminta tak menurunkan kinerjanya. Harus terus dilakukan langkah kreatif untuk meningkatkan PAD.

Salah satu anggota Komisi C DPRD Jateng Mustholih menyarankan agar dinas melibatkan perangkat desa dalam penagihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah kerja mereka, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Para perangkat desa, lanjut dia, sudah biasa terlibat dalam penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal yang perlu terus dilakukan adalah mengingatkan masyarakat untuk membayar pajak.

Mustholih memprediksi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat terealisasi melampaui target jika perangkat desa itu bisa dijadikan "pengepul" PKB. Menurutnya hal ini sangat mungkin dicoba karena secara prinsip tak ada kendala berarti.

"Pelibatan perangkat desa itu juga bisa dititipi sosialisasi bahwa uang pajak pada akhirnya akan dikembalikan ke masyarakat berupa pembangunan di berbagai bidang, pelayanan publik, atau dalam bentuk bantuan keuangan desa," jelasnya.

Di sisi lain, Mustholih meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara terperinci perihal objek pajak yang sudah rusak, pindah tangan tidak tercatat, atau hilang. Hal itu akan memengaruhi tagihan pada objek pajak. (Hanung Soekendro-56)